

Transformasi Digital sebagai Katalis Efisiensi: Shifting Skema Perencanaan Pengadaan Kendaraan Dinas pada Kementerian Perhubungan

Riyan Darmawan^{1✉}, Vidya Selasdini², Yuliarman Saragih³
Magister Terapan Pemasaran Inovasi dan Teknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

✉ Corresponding author
riyandarma1995@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola aset yang efisien dan akuntabel di lingkungan instansi pemerintah. Penelitian ini menganalisis peran SIMAN sebagai katalis efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pergeseran (*shifting*) skema perencanaan pengadaan kendaraan dinas di Kementerian Perhubungan, dari skema belanja modal menuju belanja sewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder dari modul Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun anggaran 2025–2027 serta wawancara dengan pegawai pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil analisis menunjukkan penurunan signifikan pada total usulan pengadaan kendaraan dinas dari 183 unit (2025) menjadi 111 unit (2027), disertai pergeseran skema yang paling konsisten pada Inspektorat Jenderal (100% sewa) dan Sekretariat Jenderal (dominan sewa). Kesimpulannya, SIMAN berperan sebagai filter berbasis data yang menyaring usulan redundan dan mendukung kebijakan efisiensi anggaran nasional, meski pergeseran skema pengadaan belum terjadi secara merata di seluruh unit teknis operasional.

Kata Kunci: Digitalisasi, Perencanaan Pengadaan, Barang Milik Negara, Efisiensi Anggaran, Shifting

Abstract

Digital transformation of State Asset Management through the State Asset Management Information System (SIMAN) serves as a crucial instrument for realizing efficient and accountable asset governance in government agencies. This study analyzes the role of SIMAN as a budget efficiency catalyst and its impact on the shifting of official vehicle procurement planning schemes at the Ministry of Transportation, from capital expenditure toward rental expenditure. This study employs a qualitative approach using secondary data analysis from the State Asset Requirement Plan (RKBMN) module for fiscal years 2025–2027, supplemented by in-depth interviews with officials of the Procurement and State Asset Management Bureau, Secretariat General of the Ministry of Transportation. Results show a significant decline in total vehicle procurement proposals from 183 units (2025) to 111 units (2027), with the most consistent scheme shifting observed at the Inspectorate General (100% rental) and Secretariat General (rental-dominant). In conclusion, SIMAN functions as a data-driven filter that screens redundant proposals and supports national budget efficiency policy, although scheme shifting has not occurred uniformly across all technical operational units.

Keyword: Digitalization, Procurement Planning, State-Owned Asset, Budget Efficiency, Shifting

PENDAHULUAN

Transformasi kelembagaan melalui adopsi teknologi informasi di instansi pemerintah telah menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance). Salah satu manifestasi dari reformasi birokrasi ini berada pada sektor pengelolaan kekayaan negara melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Aplikasi ini secara konsisten terus bertransformasi dari platform berbasis desktop pada awal tahun 2010-an menjadi ekosistem berbasis web yang komprehensif. SIMAN saat ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, hingga penghapusan. Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pencatatan semata, melainkan mampu mereduksi kompleksitas birokrasi dan secara fundamental mengubah cara aparatur sipil negara merencanakan, mengelola, serta mempertanggungjawabkan aset negara secara lebih efisien dan akuntabel.

Berbagai literatur terdahulu telah mengkaji efektivitas implementasi *e-government* dan SIMAN dalam administrasi publik. Juliansyah dan Amalia (2025) melalui evaluasi SIMAN V2 di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII menyimpulkan bahwa sistem ini berkontribusi nyata dalam digitalisasi pengelolaan BMN, khususnya dalam mengintegrasikan data aset secara nasional, menyediakan akses berbasis web yang fleksibel, serta mendukung efisiensi dokumentasi melalui fitur pelampiran digital. Firmansyah (2024) membuktikan bahwa implementasi SIMAN meningkatkan transparansi dengan memungkinkan pencatatan BMN yang lebih akurat dan dapat diakses secara real-time. Putra dan Zulfiati (2020) mengonfirmasi bahwa SIMAN berpengaruh positif terhadap kualitas penatausahaan BMN, khususnya pada akurasi data inventaris dan kecepatan pelaporan. Berbeda secara mendasar dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini memposisikan SIMAN sebagai variabel penjelas atas perubahan perilaku fiskal organisasi, yaitu pergeseran skema belanja pengadaan dari belanja modal menuju belanja sewa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran unit analisis dari kualitas data dan kepatuhan administratif menuju keluaran fiskal riil berupa *shifting* skema pengadaan dan penggunaan data longitudinal hasil penelaahan RKBMN tiga tahun anggaran (2025–2027) yang merupakan data persetujuan aktual Pengelola Barang, bukan sekadar persepsi pengguna sistem. Suhaimi et al. (2026) memperluas perspektif ini ke level organisasi dan menemukan bahwa kapabilitas digital bersama perilaku organisasi secara bersama-sama meningkatkan kinerja manajemen aset digital pada organisasi publik Indonesia. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan wawasan yang kaya mengenai aspek teknis dan administratif SIMAN, tinjauan literatur menunjukkan satu keterbatasan yang konsisten: mayoritas studi berfokus pada kualitas data dan kepatuhan tata usaha, belum ada yang secara empiris mengukur bagaimana implementasi SIMAN berkorelasi langsung dengan pergeseran skema dan penghematan anggaran pengadaan negara secara riil.

Di sisi lain, konteks kebijakan makro turut membentuk lanskap penelitian ini secara signifikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara eksplisit menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan belanja, termasuk pengurangan pengadaan kendaraan dinas. Kebijakan ini bukan semata-mata respons terhadap tekanan fiskal jangka pendek, melainkan bagian dari transformasi struktural pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada *value for money*. Dari sisi pengambilan keputusan pengadaan, Arifin dan Biswan (2020) telah mengkaji secara khusus opsi sewa versus beli dalam pengadaan kendaraan dinas dan menemukan bahwa keputusan optimal sangat bergantung pada horison waktu penggunaan, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa aset. Sutisna (2025) memperkuat temuan ini melalui analisis NPV pada Pemerintah Kota Cilegon dan menyimpulkan bahwa skema sewa lebih menguntungkan secara finansial dalam konteks penggunaan jangka menengah. Marta et al. (2020) menemukan hasil serupa

melalui analisis NPV di Politeknik Negeri Padang, sementara Santi et al. (2021) secara komprehensif menganalisis komparasi skema pembelian dan sewa kendaraan dinas operasional dan menyimpulkan bahwa pilihan skema optimal tidak bersifat universal melainkan sangat bergantung pada proyeksi intensitas penggunaan, ketersediaan anggaran pemeliharaan, dan kebijakan manajemen aset masing-masing instansi. Tekanan efisiensi dari kebijakan nasional secara konsisten mendorong pergeseran preferensi pengadaan dari skema pembelian aset menuju skema sewa, khususnya untuk aset bergerak seperti kendaraan dinas. Digitalisasi sistem perencanaan aset merupakan prasyarat agar kebijakan efisiensi dapat diimplementasikan secara terukur, karena tanpa data aset yang akurat, sulit untuk membuktikan bahwa suatu usulan pengadaan bersifat redundan atau dapat digantikan oleh skema alternatif. Pertanyaan sentral yang belum terjawab dalam literatur adalah: apakah pergeseran (*shifting*) skema pengadaan kendaraan dinas dari belanja modal menuju belanja sewa di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan cerminan nyata dari kebijakan efisiensi nasional, ataukah semata-mata karena faktor teknis pengelolaan aset yang difasilitasi oleh SIMAN? Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut secara empiris dikarenakan digitalisasi birokrasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merubah wajah birokrasi untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi di sebuah instansi (Noak, 2022).

Guna mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini bermaksud mencapai pemahaman yang lebih komprehensif terkait efektivitas tata kelola aset dengan melihat dampaknya pada kebijakan fiskal instansi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif berbasis data sekunder dan wawancara yang secara langsung mengukur dampak implementasi SIMAN terhadap pergeseran skema pengadaan melalui data riil persetujuan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN). Data sekunder ini digunakan untuk membandingkan tren perencanaan pengadaan kendaraan dinas (melalui skema Belanja Sewa dan Belanja Modal) di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025, 2026, dan 2027. Penelitian ini secara khusus menguji hipotesis bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah RI tercermin secara nyata dari *shifting* skema pengadaan, yakni dari belanja modal yang menghasilkan aset tetap (BMN) menuju belanja sewa yang lebih fleksibel dan bebas beban pemeliharaan jangka panjang. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital pengelolaan aset melalui SIMAN dalam mendorong pergeseran skema pengadaan kendaraan dinas serta implikasinya terhadap efisiensi anggaran di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi analisis dokumen dan wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pergeseran skema pengadaan kendaraan dinas yang bersifat kontekstual dan memerlukan triangulasi antara data faktual dan perspektif pelaku kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pemahaman kontekstual atas proses pengambilan keputusan perencanaan pengadaan yang tidak dapat direduksi menjadi angka semata, melainkan perlu ditelusuri melalui dokumen resmi dan pengalaman langsung para pelaku kebijakan. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri atas satu pejabat administrator, dua pejabat pengawas/subkoordinator, serta dua analis pengelolaan BMN pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, yang seluruhnya memiliki pengalaman minimal lima tahun dalam penyusunan dan penelaahan RKBMN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur berdurasi 45–60 menit per informan, direkam atas persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim, serta studi dokumen atas hasil penelaahan RKBMN 2025–2027. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antarinforman), triangulasi teknik (mengonfrontasi hasil wawancara dengan data RKBMN), *member checking* dengan mengembalikan ringkasan transkrip kepada informan untuk dikonfirmasi, serta *audit trail* berupa dokumentasi sistematis seluruh proses koding. Analisis tematik dilaksanakan

mengikuti enam tahap Braun dan Clarke (2006), yaitu familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, penelaahan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penyusunan laporan, sehingga prosedur penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pejabat dan staf fungsional di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Informan kunci dipilih secara purposif karena memiliki kewenangan langsung dalam penyusunan, penelaahan, dan finalisasi RKBMN di tingkat kementerian (UAPB). Wawancara difokuskan pada tiga tema utama: (1) persepsi terhadap peran SIMAN sebagai alat filter usulan kendaraan dinas; (2) dinamika pergeseran skema belanja modal ke belanja sewa di tengah tekanan kebijakan efisiensi; serta (3) kendala dan peluang implementasi digitalisasi aset dalam mendukung efisiensi anggaran secara berkelanjutan. Hasil wawancara kemudian dikodekan dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang memperkuat interpretasi data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi hasil penelaahan RKBMN yang diekstraksi langsung dari modul Perencanaan pada aplikasi SIMAN di lingkungan Kementerian Perhubungan, mencakup tahun anggaran 2025 hingga 2027. Data tersebut memuat rincian usulan pengadaan kendaraan dinas (kode barang 3020) seluruh Unit Eselon I, baik melalui skema Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 5321) maupun skema Belanja Sewa (kode akun 522141), berikut jumlah unit yang disetujui oleh Pengelola Barang (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan). Untuk memperkuat dan memvalidasi temuan dari data sekunder tersebut, penelitian ini juga melaksanakan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pejabat dan staf fungsional yang bertugas di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Para informan kunci ini dipilih secara purposif karena memiliki kewenangan langsung dalam proses penyusunan, penelaahan, dan finalisasi RKBMN di tingkat kementerian (UAPB). Wawancara difokuskan pada tiga tema utama: (1) persepsi terhadap peran SIMAN sebagai alat filter usulan kendaraan dinas; (2) dinamika pergeseran skema belanja modal ke sewa di tengah tekanan kebijakan efisiensi; serta (3) kendala dan peluang implementasi digitalisasi aset dalam mendukung efisiensi anggaran secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komparasi Data

Transformasi digital melalui aplikasi SIMAN menunjukkan dampak yang terukur terhadap efisiensi anggaran pengadaan Barang Milik Negara (BMN). Analisis data sekunder dari dokumen hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), secara khusus pada satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, mencatatkan tren penurunan persetujuan pengadaan kendaraan bermotor yang sangat signifikan selama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun anggaran 2025, tercatat persetujuan pengadaan kendaraan (kode barang 3020) sebanyak 40 unit melalui skema belanja modal. Memasuki tahun anggaran 2026, jumlah persetujuan ini mengalami penurunan menjadi 33 unit. Tren efisiensi mencapai puncaknya pada proyeksi tahun anggaran 2027, di mana hanya 17 unit kendaraan yang disetujui untuk diadakan. Penurunan volume pengadaan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pencatatan, pengawasan, dan perencanaan melalui sistem yang terintegrasi mampu menyaring usulan yang redundan atau tidak esensial. Paradigma perencanaan anggaran kini lebih berbasis pada data ketersediaan aset *eksisting* yang terekam akurat di SIMAN, sehingga meminimalisasi pemborosan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Temuan ini dapat dimaknai lebih jauh melalui lensa teori transformasi digital dan *e-government*. Vial (2019) menegaskan bahwa transformasi digital baru menciptakan nilai ketika teknologi mengubah proses pengambilan keputusan organisasi, bukan sekadar mendigitalkan dokumen; penurunan volume usulan yang tersaring melalui Modul RKBMN menunjukkan bahwa SIMAN telah mencapai tahap tersebut, yakni

mengubah logika perencanaan dari berbasis usulan menjadi berbasis data aset. Dalam kerangka Mergel et al. (2019), perubahan ini merepresentasikan pergeseran dari sekadar digitisasi menuju transformasi, karena yang berubah bukan format dokumen melainkan relasi akuntabilitas antara satuan kerja dan Pengelola Barang. Temuan ini juga sejalan dengan konsep nilai publik *e-government* (Twizeyimana dan Andersson, 2019) pada dimensi efisiensi administrasi dan akuntabilitas, memperkuat bukti Tangi et al. (2021) bahwa faktor organisasi dan tata kelola menentukan sejauh mana teknologi pemerintahan menghasilkan perubahan nyata, serta konsisten dengan tinjauan sistematis Haug et al. (2024) mengenai perubahan yang diinduksi digitalisasi di sektor publik. Dari perspektif manajemen aset publik dan pengadaan publik, hasil ini mengonfirmasi temuan Firmansyah (2024) dan Setyaningsih et al. (2025) bahwa integrasi data aset mempercepat dan mendisiplinkan proses administratif, sekaligus memperluasnya dengan menunjukkan konsekuensi fiskal yang konkret berupa penurunan persetujuan pengadaan, sebagaimana peran *e-government* dalam mendorong pengadaan publik yang lebih akuntabel dan berkelanjutan (Adjei-Bamfo et al., 2019).

Tabel 1. Komparasi Rencana Pengadaan Kendaraan Dinas Seluruh Unit Eselon I

Tahun	Skema Belanja Sewa (522141)	Skema Belanja Modal (5321)	Total	Persentase Belanja Sewa	Persentase Belanja Modal
2025	23 Unit	160 Unit	183 Unit	12,50%	87,50%
2026	40 Unit	142 Unit	182 Unit	22,00%	78,00%
2027	22 Unit	89 Unit	111 Unit	19,80%	80,20%

Tabel 2. Rekapitulasi Rencana Pengadaan Kendaraan Per Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode 2025 s.d. 2027

Unit Eselon I	Tahun	Skema Belanja Sewa (522141)	Skema Belanja Modal (5321)	Total Rencana Pengadaan
Sekretariat Jenderal	2025	13	7	20
	2026	23	3	26
	2027	15	17	32
TOTAL		51	27	78
Inspektorat Jenderal	2025	7	0	7
	2026	7	0	7
	2027	7	0	7
TOTAL		21	0	21
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2025	0	57	57
	2026	7	40	47
	2027	0	12	12
TOTAL		7	109	116
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2025	0	40	40
	2026	0	33	33
	2027	0	17	17
TOTAL		0	90	90
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	2025	0	11	11
	2026	0	21	21

Unit Eselon I	Tahun	Skema Belanja Sewa (522141)	Skema Belanja Modal (5321)	Total Rencana Pengadaan
	2027	0	11	11
TOTAL		0	43	43
Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2025	0	22	22
	2026	3	20	23
	2027	0	15	15
TOTAL		3	57	60
Badan Kebijakan Transportasi	2025	0	6	6
	2026	0	7	7
	2027	0	2	2
TOTAL		0	15	15
BPSDM Perhubungan	2025	3	17	20
	2026	0	18	18
	2027	0	15	15
TOTAL		3	50	53
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek / Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	2027	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Secara umum, tren efisiensi dan penghematan anggaran ditandai dengan indikator bahwa banyak Unit Eselon I menunjukkan tren penurunan jumlah rencana pengadaan kendaraan dinas dari tahun 2025 ke 2027. Contoh yang paling mencolok adalah Ditjen Perhubungan Darat, yang awalnya merencanakan 57 unit di tahun 2025, turun menjadi 47 unit di 2026, dan merosot drastis menjadi hanya 12 unit di 2027. Hal serupa terjadi pada Ditjen Perhubungan Laut (dari 40 unit di 2025 turun menjadi 17 unit di 2027) dan BPSDM Perhubungan (dari 20 unit di 2025 menjadi 15 unit di 2027). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebutuhan mendesak atas kendaraan dinas sebagian besar telah terpenuhi di tahun-tahun awal atau terdapat efisiensi anggaran di tahun 2027.

Dalam hal preferensi Skema Belanja (Sewa vs Pembelian/Modal), mayoritas Unit Eselon I sangat mengandalkan skema Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) (pembelian aset). Namun, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal menjadi pengecualian. Inspektorat Jenderal 100% menggunakan skema Belanja Sewa untuk pengadaan kendaraannya (21 unit dalam tiga tahun). Sementara itu, Sekretariat Jenderal mendominasi penggunaan skema sewa dengan 51 unit disewa dibandingkan 27 unit yang dibeli. Hal ini lumrah terjadi pada unit pendukung manajemen pusat yang lebih memilih efisiensi pemeliharaan kendaraan operasional melalui skema sewa.

2. Peran SIMAN sebagai Katalis dan Filter Efisiensi Pengadaan Kendaraan Dinas

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, melainkan telah berevolusi menjadi katalis efisiensi yang aktif dalam proses perencanaan kebutuhan BMN. Peran sentral ini terwujud melalui mekanisme filter otomatis yang tertanam dalam Modul RKBMN pada SIMAN v2. Ketika satuan kerja mengajukan usulan pengadaan kendaraan dinas, sistem secara otomatis melakukan komparasi antara usulan tersebut dengan data aset eksisting yang tercatat dalam Master Aset SIMAN, termasuk kondisi kendaraan, status penggunaan, nilai buku, dan tingkat kesesuaiannya dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Usulan yang tidak didukung oleh justifikasi berbasis data – misalnya ketika

satuan kerja masih memiliki kendaraan dengan kondisi baik atau jumlah kendaraan eksisting telah melampaui SBSK — akan disaring pada tahap penelaahan sehingga tidak mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, SIMAN berperan sebagai jembatan antara kebijakan makro pemerintah dan implementasi operasional di tingkat satuan kerja. Tanpa keakuratan data aset yang terjamin oleh SIMAN, penelaahan RKBMN akan sangat bergantung pada dokumen kertas yang rentan terhadap manipulasi atau inkonsistensi data. Dengan basis data terpusat dan terintegrasi, Pengelola Barang dapat melakukan cross-check secara real-time antara usulan pengadaan baru dengan inventaris kendaraan yang sudah dimiliki oleh setiap satuan kerja di seluruh Indonesia. Hal ini secara empiris mendukung argumen bahwa SIMAN bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang mendefinisikan ulang standar akuntabilitas perencanaan pengadaan aset di sektor publik. Temuan wawancara dengan pejabat Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan memperkuat kesimpulan ini: para informan menyatakan bahwa ketersediaan data eksisting yang akurat di SIMAN memberikan landasan yang kuat bagi tim penelaah untuk menolak atau merekomendasikan revisi atas usulan pengadaan yang dinilai tidak efisien, sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah. Hal ini selaras dengan temuan Trangguna (2024) yang secara spesifik mengevaluasi pengelolaan BMN di Biro yang sama dan menyimpulkan bahwa optimalisasi penggunaan data aset eksisting merupakan kunci efisiensi perencanaan pengadaan. Relevansinya juga dapat ditemukan pada konteks yang lebih luas: Ma'arif et al. (2026) dalam kajian penyusunan RKBMD di instansi kesehatan menemukan bahwa desain hubungan kerja yang terstruktur antara pengguna barang dan pengelola barang merupakan faktor penentu kualitas perencanaan kebutuhan, sebuah prinsip yang berlaku pula dalam konteks Kementerian Perhubungan di mana SIMAN menjadi jembatan koordinasi antara satuan kerja dan Pengelola Barang. Selain itu, peran SIMAN sebagai filter juga secara tidak langsung mendorong satuan kerja untuk mempertimbangkan opsi sewa sebagai alternatif yang lebih efisien dibanding pembelian aset baru, sejalan dengan kerangka analitis Arifin dan Biswan (2020) serta Santi et al. (2021) dalam mengevaluasi keputusan opsi sewa atau beli kendaraan dinas.

3. Analisis Shifting Skema Pengadaan per Unit Eselon I

Analisis data RKBMN per Unit Eselon I memperlihatkan pola yang bervariasi dalam hal shifting skema pengadaan kendaraan dinas. Berikut adalah uraian per unit berdasarkan Tabel 2.

Pertama, Sekretariat Jenderal (Setjen) merupakan unit yang paling jelas menunjukkan shifting skema. Pada tahun 2025, Setjen mengajukan 13 unit sewa dan 7 unit beli. Di tahun 2026, komposisi berubah drastis menjadi 23 unit sewa dan hanya 3 unit beli. Meskipun pada 2027 belanja modal sedikit naik ke 17 unit (berbanding 15 unit sewa), secara agregat tiga tahun Setjen justru lebih banyak menyewa (51 unit) dibanding membeli (27 unit). Tren ini mengindikasikan bahwa Setjen telah mengadopsi paradigma sewa sebagai strategi utama pengadaan kendaraan operasional, konsisten dengan peran Setjen sebagai unit pendukung manajemen pusat yang mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi pemeliharaan.

Kedua, Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan satu-satunya unit yang 100% menggunakan skema sewa secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut (7 unit per tahun, total 21 unit). Tidak ada satu pun usulan belanja modal yang disetujui. Pola ini mencerminkan kebijakan internal Itjen yang sangat tegas dalam menghindari penambahan aset tetap baru, kemungkinan besar didorong oleh pertimbangan efisiensi pemeliharaan dan mobilitas tinggi yang dibutuhkan fungsi pengawasan. Ini adalah bukti paling konkret dari shifting skema yang sempurna dalam konteks penelitian ini.

Ketiga, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menunjukkan tren efisiensi volume yang paling dramatis meskipun belum terjadi shifting skema secara penuh. Total usulan turun tajam dari 57 unit (2025) menjadi 47 unit (2026) dan hanya 12 unit (2027). Pada 2026, muncul 7 unit sewa untuk pertama kalinya, menandai awal adaptasi skema sewa. Namun secara

keseluruhan, Ditjen Hubdat masih sangat mengandalkan belanja modal (109 dari 116 unit total). Pola ini mengindikasikan bahwa efisiensi yang terjadi lebih bersifat efisiensi volume – pengurangan jumlah unit yang diusulkan – ketimbang shifting skema pengadaan. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh karakteristik operasional Ditjen Hubdat yang memerlukan kendaraan dinas yang terspesialisasi dan tidak mudah digantikan dengan skema sewa standar.

Keempat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menunjukkan efisiensi volume yang konsisten namun tanpa shifting skema sama sekali: seluruh pengadaan dilakukan melalui belanja modal dengan tren penurunan dari 40 unit (2025) menjadi 33 unit (2026) dan 17 unit (2027). Tidak ada satu pun unit sewa yang diajukan atau disetujui sepanjang periode penelitian. Ini dapat dimaknai bahwa Ditjen Hubla memilih untuk mempertahankan kepemilikan aset kendaraan secara penuh, kemungkinan karena kebutuhan operasional kepelabuhanan yang sangat spesifik dan tersebar di wilayah-wilayah kepulauan yang tidak terjangkau oleh vendor sewa umum.

Kelima, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memperlihatkan pola yang berbeda dari unit-unit lainnya. Volume pengadaan justru naik dari 11 unit (2025) menjadi 21 unit (2026) sebelum kembali ke 11 unit (2027), dan seluruhnya menggunakan belanja modal tanpa ada komponen sewa. Lonjakan pada 2026 kemungkinan mencerminkan pemenuhan kebutuhan mendesak yang tertunda (backlog), dan stabilisasi kembali di 2027 mengindikasikan normalisasi setelah kebutuhan tersebut terpenuhi. Tidak ditemukannya shifting skema pada Ditjen Hubud dapat mengindikasikan bahwa karakteristik tugas dan sebaran wilayah kerja bandara menjadi hambatan utama adopsi skema sewa.

Keenam, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) menunjukkan tren penurunan volume yang stabil (22 unit di 2025, 23 unit di 2026, dan 15 unit di 2027), dengan kemunculan 3 unit sewa pada 2026 yang kemudian kembali ke nol pada 2027. Pola ini mengindikasikan bahwa skema sewa masih bersifat eksperimental di Ditjen KA dan belum menjadi pilihan strategis yang konsisten. Ketujuh, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) mencatat penurunan signifikan dari 6 unit (2025) menjadi hanya 2 unit (2027) dengan seluruhnya melalui belanja modal. Kedelapan, BPSDM Perhubungan menunjukkan tren penurunan belanja modal dari 17 unit (2025) menjadi 15 unit (2027) tanpa ada adopsi skema sewa. Kesembilan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda sama sekali tidak mengajukan usulan pengadaan kendaraan dinas sepanjang periode 2025–2027, kemungkinan karena kebutuhan kendaraan dinas telah sepenuhnya terpenuhi.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa shifting skema dari belanja modal ke belanja sewa belum terjadi secara merata di seluruh Unit Eselon I Kementerian Perhubungan. Hanya Inspektorat Jenderal yang menunjukkan shifting penuh, sementara Sekretariat Jenderal berada dalam proses transisi yang signifikan. Unit-unit teknis operasional cenderung mempertahankan skema belanja modal karena pertimbangan spesifikitas operasional dan keterbatasan pasar sewa di wilayah kerja mereka. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memang tercermin dalam penurunan volume pengadaan secara keseluruhan, namun pergeseran paradigma skema pengadaan masih berjalan secara gradual dan tidak seragam, sangat dipengaruhi oleh karakteristik tugas dan kondisi geografis masing-masing unit kerja.

Tabel 3. Tren Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 s.d. 2024 pada Kemenhub

Tahun	Total Belanja (Rp)
2016	1.719.319.643.312
2017	2.475.439.587.377
2018	595.769.870.632

2019	256.624.208.542
2020	189.340.298.982
2021	423.641.965.390
2022	172.484.411.194
2023	188.878.205.759
2024	260.231.548.333
TOTAL	6.281.729.739.521

Tabel 4. Tren Belanja Sewa Tahun 2016 s.d. 2024 pada Kemenhub

Tahun	Total Belanja (Rp)
2016	55.432.765.844
2017	53.617.560.933
2018	135.745.392.609
2019	190.625.854.489
2020	214.750.505.117
2021	162.546.298.217
2022	182.800.326.168
2023	184.621.026.498
2024	200.667.040.175
TOTAL	1.380.806.770.050

Tren jangka panjang pada Tabel 3 dan Tabel 4 memperkuat temuan *shifting* skema pengadaan dari dua arah yang saling melengkapi. Di satu sisi, realisasi belanja modal peralatan dan mesin Kemenhub menurun tajam dari puncaknya sebesar Rp2,47 triliun pada 2017 menjadi hanya Rp260,23 miliar pada 2024, atau terkontraksi sekitar 89% dalam tujuh tahun; sejak 2019 belanja modal secara konsisten bertahan di bawah Rp430 miliar per tahun. Di sisi lain, realisasi belanja sewa justru bergerak berlawanan arah: naik dari Rp55,43 miliar pada 2016 menjadi Rp200,67 miliar pada 2024, atau tumbuh hampir empat kali lipat, dan sejak 2019 stabil di atas Rp160 miliar per tahun. Perubahan komposisi belanja ini semakin mencolok apabila dilihat dari rasionya: pada 2016 realisasi belanja sewa hanya setara sekitar 3% dari belanja modal peralatan dan mesin, sedangkan pada 2024 rasionya telah mencapai sekitar 77%; bahkan pada 2020 dan 2022 realisasi belanja sewa melampaui realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Pergeseran usulan pengadaan kendaraan dinas dari belanja modal menuju belanja sewa yang terekam dalam RKBMN 2025–2027 dengan demikian bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dan penajaman dari tren struktural hampir satu dekade terakhir: semakin sedikit aset baru yang dibeli, semakin besar peran skema sewa dan optimalisasi aset eksisting dalam memenuhi kebutuhan operasional. Dengan kata lain, pola divergensi antara kurva belanja modal yang menurun (Tabel 3) dan kurva belanja sewa yang meningkat (Tabel 4) merupakan bukti agregat bahwa *shifting* skema yang difasilitasi SIMAN telah berlangsung secara struktural, bukan insidental.

Guna memperkuat basis empiris hubungan SIMAN dengan efisiensi anggaran, beberapa indikator terukur dapat dikemukakan dari data penelitian ini. Pertama, total persetujuan pengadaan kendaraan dinas turun 39,3% dalam tiga tahun (dari 183 unit pada 2025 menjadi 111 unit pada 2027), dengan persetujuan skema belanja modal turun lebih tajam sebesar 44,4% (dari 160 unit menjadi 89 unit). Kedua, tren realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tabel 3 menunjukkan kontraksi sekitar 89% dari puncak 2017 ke 2024, periode yang beririsan dengan diberlakukannya penelaahan RKBMN berbasis SIMAN sebagai prasyarat perencanaan pengadaan, sementara realisasi belanja sewa pada Tabel 4 justru tumbuh hampir empat kali lipat pada periode

yang sama (dari Rp55,43 miliar pada 2016 menjadi Rp200,67 miliar pada 2024) dan bahkan melampaui realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada 2020 dan 2022. Ketiga, hasil wawancara mengonfirmasi bahwa usulan yang tidak lolos verifikasi data aset eksisting pada SIMAN ditolak pada tahap penelaahan, sehingga sistem berfungsi sebagai kontrol terhadap belanja. Meskipun demikian, penulis mengakui bahwa estimasi besaran penghematan anggaran dalam satuan rupiah memerlukan data realisasi belanja per usulan yang berada di luar lingkup penelitian ini, sehingga hubungan yang dibangun bersifat asosiatif berbasis triangulasi data, bukan kausalitas statistik; hal ini ditegaskan sebagai keterbatasan penelitian.

SIMPULAN

Transformasi digital melalui SIMAN terbukti berperan sebagai katalis efisiensi yang berimplikasi signifikan pada paradigma perencanaan pengadaan dan penghematan anggaran negara. Integrasi data aset secara real-time *secara nyata mendukung efisiensi ini, sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional yang sedang digalakkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang terbatas pada kepatuhan administrasi fisik, studi ini membuktikan secara empiris bahwa digitalisasi aset melalui SIMAN berperan sebagai katalis sekaligus filter aktif yang menekan pemborosan anggaran pengadaan. Data RKBMN merepresentasikan hal tersebut melalui tren penurunan tajam total usulan pengadaan kendaraan dinas dari 183 unit (2025) menjadi 111 unit (2027), dengan shifting skema yang paling konsisten terjadi pada Inspektorat Jenderal (100% sewa) dan Sekretariat Jenderal (dominan sewa). Namun demikian, pergeseran skema dari belanja modal ke belanja sewa belum terjadi secara merata di seluruh Unit Eselon I, mengindikasikan bahwa faktor operasional dan geografis masih menjadi pertimbangan dominan di unit-unit teknis. Guna menyempurnakan temuan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis ke dimensi realisasi anggaran. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah: apakah belanja sewa kendaraan dinas benar-benar lebih hemat secara total cost of ownership dibandingkan belanja modal dalam jangka panjang? Kajian komparatif antara total pengeluaran sewa kumulatif selama lima hingga sepuluh tahun versus harga perolehan ditambah biaya pemeliharaan kendaraan yang dibeli perlu dilakukan secara komprehensif untuk memberikan landasan kebijakan yang lebih kokoh, melanjutkan kerangka analisis NPV yang telah dikembangkan oleh Arifin dan Biswan (2020), Marta et al. (2020), Santi et al. (2021), dan Sutisna (2025) dalam konteks instansi yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor moderasi yang mempengaruhi kecepatan adopsi skema sewa di masing-masing unit, termasuk ketersediaan vendor sewa di wilayah operasional, regulasi pengadaan yang berlaku, serta budaya organisasi yang membentuk preferensi pengelola BMN dalam memilih antara kepemilikan dan sewa aset kendaraan dinas.

Penelitian ini memberikan bukti empiris awal bahwa sistem informasi manajemen aset dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal. Bagi Kementerian Perhubungan dan instansi pemerintah lainnya, temuan ini menegaskan pentingnya menjaga akurasi dan kemutakhiran data aset pada SIMAN sebagai fondasi penelaahan RKBMN, mendorong perluasan adopsi skema sewa pada unit pendukung manajemen, serta menyusun strategi khusus bagi unit teknis operasional yang menghadapi keterbatasan pasar sewa di wilayah kerjanya.

Penelitian ini terbatas pada data perencanaan (usulan dan persetujuan RKBMN) dan belum menjangkau data realisasi belanja, sehingga besaran penghematan anggaran dalam satuan rupiah belum dapat dikuantifikasi; cakupan objek terbatas pada kendaraan dinas (kode barang 3020) di satu kementerian; dan informan terbatas pada unit pengelola tingkat pusat, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati dan dibatasi pada konteks instansi dengan karakteristik serupa. Sebagaimana diuraikan di atas, riset lanjutan disarankan menganalisis *total cost of ownership* skema sewa versus beli menggunakan data realisasi multi-tahun, menguji faktor-faktor moderasi adopsi skema sewa antarunit, serta memperluas objek penelitian ke jenis BMN lain dan

kementerian/lembaga lain guna menguji keberlakuan model filter fiskal berbasis data ini, sejalan dengan agenda riset digitalisasi layanan publik yang terus berkembang (Latupeirissa et al., 2024).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, atas dukungan yang memungkinkan penulis melakukan penelitian dan menempuh pendidikan Magister Terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Selain itu, apresiasi turut diberikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah memfasilitasi akses data sekunder, serta kepada seluruh informan dan pejabat pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjei-Bamfo, P., Maloreh-Nyamekye, T., & Ahenkan, A. (2019). The role of e-government in sustainable public procurement in developing countries: A systematic literature review. *Resources, Conservation and Recycling*, 142, 189–203. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.12.001>
- Arifin, Z., & Biswan, A. T. (2020). Pengambilan Keputusan Manajerial: Opsi sewa atau beli dalam pengadaan kendaraan dinas. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *5*(1), 17–29. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.169>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi SIMAN dan SIMAK-BMN: Solusi Teknologi untuk Transparansi dan Efisiensi BMN di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, *19*(2), 186–199. <https://doi.org/10.21009/wahana.19.0213>
- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(7), 1963–1987. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917>
- Juliansyah, R., & Amalia, R. (2025). Evaluasi digitalisasi pengelolaan aset negara: Studi aplikasi SIMAN V2 di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII menggunakan SWOT. *Simtek: Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, *10*(2). <https://ejournal.caturakti.ac.id/index.php/simtek/article/view/1580>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*.
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. K. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming public service delivery: A comprehensive review of digitization initiatives. *Sustainability*, 16(7), 2818. <https://doi.org/10.3390/su16072818>
- Ma'arif, A. N., Perdana, W. S., & Rimawati, E. (2026). Work Relationship Design for the Preparation of Regional Property Requirements Plans (RKBMD) at Semarang City Health Office. *Proceedings of the 3rd Universitas Dian Nuswantoro International Conference on Health Sciences (UNICHHS 2025)*. <https://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/unichs/article/view/1929>
- Marta, A., Deli, F. Y., & Rasyid, A. (2020). Analisis Net Present Value dalam Pemilihan Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional di Politeknik Negeri Padang. Dalam *EAI* (hlm. 47–54). <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2019.2294024>

- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Noak, P. A. (2022). Digitalisasi Birokrasi dalam Wilayah Publik dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, *4*(2), 132. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2022.v04.i02.p05>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, O. D. H., & Zulfiati, L. (2020). The Influence Of State Asset Management Systems-User of Goods (SIMAN-PB) on The Administration of State Owned Goods. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, X(X), XX-XX.
- Santi, E., Wirahadi, A., Saputra, A. W., Mustika, R., & Ferdawati. (2021). Analisis Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, *18*(1), 50-61. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam/article/view/60>
- Setyaningsih, R., Sukoharsono, E. G., & Iqbal, S. (2025). Analysis of the Implementation of Determination of Usage Status of State-Owned Assets Through Siman Version 2 at The Ministry of Public Works. *The International Journal of Accounting and Business Society*, *33*(1). <https://doi.org/10.21776/ijabs.2025.33.1.901>
- Simamora, L. X., Hendrian, & Patirol, S. P. S. (2025). Analysis of Human Resources Competence in State Asset Management (BMN) Through Siman and Sakti Applications Based on Technology Accepted Model (TAM) at KPKNL Kisaran. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, *5*(4), 3952–3967. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v5i4.641>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Suhaimi, E., Majid, M. S. A., Djalil, M. A., & Putra, T. R. I. (2026). Behavioral and Digital Capabilities in Enhancing Digital Asset Management Performance in Indonesian Public Organizations. *International Journal of Electronic Government Research*, *22*(1), 1-28. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.410775>
- Sutisna, N. (2025). Pemilihan Strategi Pengadaan Kendaraan Dinas Pada Pemerintah Daerah: Studi Analisis NPV di Pemerintah Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *9*(1), 41-60. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.366>
- Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. *International Journal of Information Management*, 60, 102356. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356>
- Tranggana, T. (2024). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. *Jurnal Riset Akuntansi*, *2*(2), 85–94. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1720>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of e-government – A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Wardiningsih, R., Ramadhani, D., & Adriani Auliana, R. (2026). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUMBAWA. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *7*(1), 1-13. <https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.528>